

**Analisis Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah Dan Peran
Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah
Daerah Dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel
Intervening
(Studi pada Kecamatan Jepara di Kabupaten Jepara)**

M. Aris Afifuddin¹, Sukirman², Sunarno H³

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Muria Kudus^{1,2,3}

Email korespondensi: afifudinaris@yahoo.co.id

Received: 01 Okt 2020 Reviewed: 10 Okt 2020 Accepted: 01 Nov 2020 Published: 31 Jan 2021

ABSTRACT

The performance of regional governments can be influenced by various factors, including internal control systems, regional financial management and organizational commitment. The study aims to analyze the effect of internal control systems on organizational commitment, regional financial management on organizational commitment, internal control systems on local government performance, regional financial management on performance, organizational commitment to performance, the effect of internal control systems on local government performance through organizational commitment, the influence of regional financial management on the performance of local governments through organizational commitment to employees in Jepara District, Jepara Regency.

This research is explanatory research. The research subjects were all employees at the village and village offices in Jepara sub-district, Jepara Regency with a total sample of 152 employees. The instrument for collecting data was a questionnaire. Hypothesis testing is analyzed using SEM (Structural Equation Modeling).

The results of the study stated that the system of internal control and regional financial management affects the performance of local governments. The internal control system and regional financial management influence the organizational commitment. Organizational commitment influences the performance of local government. Internal control systems and regional financial management affect the performance of local governments through organizational commitment.

Keywords: internal control system, regional financial management, organizational commitment, local government performance.

Keywords: internal control system, regional financial management, organizational commitment, local government performance.

ABSTRAK

Kinerja pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu sistem pengendalian *intern*, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian *intern* terhadap komitmen

organisasi, pengelolaan keuangan daerah terhadap komitmen organisasi, sistem pengendalian *intern* terhadap kinerja pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah terhadap terhadap kinerja, komitmen organisasi terhadap kinerja, pengaruh sistem pengendalian *intern* terhadap kinerja pemerintah daerah melalui komitmen organisasi, pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah melalui komitmen organisasi pada pegawai di Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

Penelitian ini adalah penelitian explanatory. Subyek penelitian adalah semua pegawai pada kantor kelurahan dan desa di kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dengan jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 152 pegawai. Instrumen proses pengumpulan data adalah kuesioner. Pengujian hipotesis dianalisis menggunakan SEM (Structural Equation Modeling). Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pengendalian *intern* dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sistem pengendalian *intern* dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sistem pengendalian *intern* dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah melalui komitmen organisasional

Kata kunci: sistem pengendalian *intern*, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi, kinerja pemerintah daerah.

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah kabupaten dan kota menjadikan pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Daerah diberi wewenang dan tanggung jawab yang besar untuk mengelola sumber-sumber keuangan demi kemakmuran rakyat di daerahnya (Praja, 2015). Pemerintah Daerah harus melakukan tata kelola pemerintah yang baik agar tercipta *good governance* dan *clean government*. Pengelolaan pemerintahan yang baik mencerminkan pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik.

Pada era reformasi dan otonomi daerah sekarang ini, kinerja pemerintah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kritik tersebut tanpa terkecuali mulai dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan terendah yaitu pemerintah desa dan kelurahan (Sadat, 2019).

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014, desa diberikan otonomi atau kewenangan untuk melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya. Hal ini menjadi tantangan serta dorongan besar bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Terdapat banyak standar atau ukuran kinerja, diantaranya yaitu faktor masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) (Pangkey, Saerang, & Tulung, 2017). Untuk mencapai kinerja yang baik, maka faktor-faktor tersebut harus terpenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai contoh, dalam

hal hasil yang dicapai, aparat pemerintahan harus memiliki kemampuan menyelesaikan tugas atau program sesuai jadwal. Namun, fenomena di Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara terlihat masih ada kekurangan dalam pertanggungjawaban laporan keuangan. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan dalam pengumpulan laporan keuangan dari beberapa kelurahan serta kurangnya koordinasi antar perangkat sehingga menyebabkan proses pelaksanaan program maupun penyusunan laporan menjadi tertunda.

Kinerja pemerintah daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu sistem pengendalian *intern*. Agar tercapai kinerja yang baik perlu dilakukan suatu pengawasan *intern* agar kegiatan/tindakan setiap individu/organisasi terawasi dan dipantau secara baik. Maka dari itu pengawasan *intern* diharapkan dapat membantu para anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif dan mencapai kinerja yang lebih baik.

Sistem pengendalian *intern* pemerintah yang baik berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait pencatatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, dan (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian *intern* perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

Meskipun sistem pengendalian *intern* telah dijalankan, namun masih terdapat banyak kendala dan kelemahan dalam pelaksanaan di lapangan, termasuk di Kabupaten Jepara. Kelemahan sistem pengendalian *intern* diakibatkan karena satuan pengawasan *intern* yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas pula dari aspek pengelolaan keuangan daerah. Agar tercapai pengelolaan keuangan yang baik diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, dimana seluruh penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, dilakukan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien.

Pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan atau kompetensi para pegawai pengelola keuangan. Seperti dijelaskan oleh Murina & Rahmawaty (2017) bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menyangkut peraturan pendukungnya dan sarana-prasarana, namun yang paling penting adalah SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang dapat diandalkan. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, fenomena di beberapa kantor kelurahan di Kecamatan Jepara terlihat masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari kurang efektifnya penyusunan dan penganggaran sumber daya yang kurang tepat sasaran. Proses mencatat, melaporkan, dan menganalisis anggaran dan realisasinya masih kurang terorganisir dengan baik antar unit-unit kerja. Kondisi ini mencerminkan kinerja manajerial yang belum tercapai dengan baik.

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh sistem pengendalian *intern* dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Namun, terdapat adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian tersebut (*research gap*). Penelitian Praja (2015) menunjukkan peran pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Penelitian lainnya oleh serta Cholis & Fadli (2018) membuktikan bahwa sistem pengendalian *intern* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berbeda dengan penelitian tersebut di atas, hasil penelitian Eristanti & Putra (2017) menyebutkan adanya pengaruh negatif komitmen organisasi dan sistem pengendalian *intern* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian oleh Defitri (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel *intervening* yaitu komitmen organisasional. Disamping sistem pengendalian *intern* dan pengelolaan keuangan, komitmen organisasi juga penting untuk tercapainya kinerja pemerintah daerah yang baik. Faktor yang berhubungan dengan pegawai adalah komitmen organisasi dalam diri pegawai untuk melaksanakan tugas pokok yang dibebankan. Pemerintah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat tercipta dalam pengelolaan keuangan yang berdampak meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dari uraian beberapa penelitian terdahulu sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian *intern* dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah melalui komitmen organisasional sebagai variabel *intervening*..

B. TELAAH PUSTAKA

Sistem pengendalian *intern*

Sistem pengendalian *intern* adalah adalah Semua rencana organisasi serta peraturan yang diberlakukan dalam suatu oganisasi yang digunakan untuk menjaga aset, mengukur keakuratan dan kewajaran data, meningkatkan efisiensi dalam operasional serta membantu mencegah penyimpangan dari kebijakan. Indikator Sistem Pengendalian *Intern* terdiri dari (Wulandari & Nuryanto, 2018) :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian,
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian *intern*

Pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan dalam mengelola keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. Indikator-indikator pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut (Moha, Kalangi,& Warongan, 2017):

1. Akuntabilitas
2. Value for money
3. Kejujuran
4. Transparansi
5. Pengendalian

Komitmen organisasional

Komitmen organisasional adalah Suatu keadaan seorang pegawai untuk patuh pada organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam

organisasi. Indikator komitmen organisasional terdiri sebagai berikut (Rinie, Pranata, Rapina, 2019):

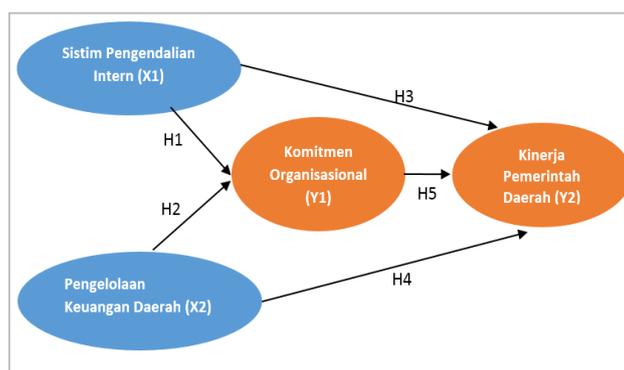
1. Komitmen afektif
2. Komitemn berkelanjutan
3. Komitmen normatif

Kinerja pemerintah daerah

Hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun indikator kinerja pemerintah daerah sebagai berikut (Pangkey,.Saerang., &Tulung, 2017):

1. Masukan (*Inputs*)
2. Proses (*Process*)
3. Keluaran (*Output*)
4. Hasil (*Outcome*)
5. Manfaat (*Benefit*)
6. Dampak (*Impact*)

KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 2.1
Kerangka Konsep pemikiran

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksplanatori dan deskriptif. Penelitian eksplanatori adalah suatu metode penelitian yang bermaksud menjelaskan

kedudukan variable-variabel yang diteliti serta hubungan kausal antara variabel satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis. Subjek penelitian adalah seluruh pegawai Kecamatan beserta pegawai Kelurahan dan Sarekat Desa yang ada di Kecamatan Jepara. Pengambilan sampel menggunakan total sampling atau sensus dan di peroleh sampel sebanyak 152 orang responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis digunakan analisis SEM (*Structural Equation Modelling*) dengan bantuan program AMOS 22.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan hasil uji validitas dan reliabilitas data serta hasil pengujian hipotesis.

Uji Validitas

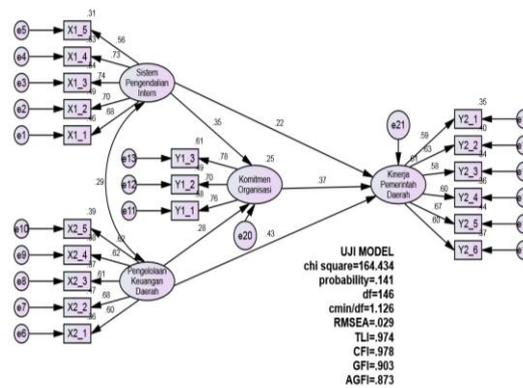
Uji validitas dilakukan dengan analisis konfirmatori. Hasil pengujian kelayakan model konfirmatori variabel eksogen maupun endogen dapat diketahui bahwa model dapat memenuhi kriteria *goodness of fit* yang telah ditetapkan yang ditunjukkan oleh nilai ukuran kelayakan model berada dalam kategori baik. Hasil uji validitas menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai loading di atas 0,5, artinya indikator dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai penyusun variabel.

Reliabilitas

Uji reliabilitas diperoleh nilai *construct reliability* untuk variabel Sistem pengendalian *intern* (0.778), Pengelolaan keuangan daerah (0.764), Komitmen organisasional (0.791), dan Kinerja pemerintah daerah (0.784). Oleh karena nilai *construct reliability* di atas 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki reliabilitas yang baik (Ghozali, 2011).

Hasil Analisis Full Model

Hasil analisis full model SEM disajikan di bawah ini.



Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan AMOS 22.

Gambar 4. 1

Analisis Full Model

Berdasarkan hasil pengujian *Goodness of Fit* model yang disajikan dalam Tabel 1 diketahui bahwa hasil estimasi nilai *Chi-Square*= 164,434. Nilai tersebut berada dibawah nilai *Chi-Square* tabel dengan $df = 146$, yaitu sebesar 175.20. Pada kriteria kesesuaian model yang lain yaitu nilai probabilitas $(0,141) \geq 0,05$, $CMIN/DF (1,126)$, $RMSEA (0,029)$, $CFI (0,978)$, $TLI (0,974)$, $GFI (,903)$, artinya kriteria tersebut terdapat pada rentang nilai yang diharapkan, yakni termasuk pada kategori baik, sehingga pada kriteria tersebut kesesuaian model telah terpenuhi. Kriteria $AGFI$ termasuk pada kategori marginal atau mendekati fit.

Hasil *goodness of fit* pada full model penelitian menunjukkan hasil yang baik, meskipun masih terdapat kriteria yang tergolong marginal fit. Namun, hasil estimasinya sudah mendekati *cut of value* yang disyaratkan, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat kesesuaian antara input observasi dengan prediksi dari model yang dibentuk dan dapat disimpulkan bahwa model struktural ini dapat diterima dan dapat dilanjutkan pada analisis selanjutnya.

Tabel 4.1

Hasil Uji Goodness of Fit Full Model SEM

<i>Goodness</i>	Cut off	Hasil	Evalua
Chi-Square	Kecil (<175.4)	164.43	Baik
Probabil	$\geq 0,05$	0.141	Baik
CMIN/	$\leq 2,00$	1.126	Baik
RMSEA	$\leq 0,08$	0.029	Baik
TLI	$\geq 0,95$	0.974	Baik
CFI	$\geq 0,95$	0.978	Baik

GFI	≥ 0,90	0.903	Baik
AGFI	≥ 0,90	0.873	Marji

Hasil uji kesesuaian model tersebut berarti bahwa terdapat kesesuaian antara input observasi dengan prediksi dari model yang dibentuk dan dapat disimpulkan bahwa model struktural ini dapat diterima.

Pengujian Asumsi SEM

1. Uji Normalitas

Evaluasi normalitas data dilakukan dengan menggunakan nilai *critical ratio kurtosis value* sebesar $\pm 2,58$ (Ferdinand, 2014: 203). Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai C.R. multivariate untuk *kurtosis* sebesar 1,699. Nilai tersebut berada di dalam rentang ± 2.58 , artinya data penelitian yang digunakan telah memenuhi persyaratan normalitas data atau dapat dikatakan bahwa data penelitian telah berdistribusi normal.

2. Uji Outliers

Uji *multivariate* outlier diketahui dengan melihat nilai terbesar *malahanobis distance*.

Tabel 4.2

Uji Multivariate Outliers

Jumlah Observasi	Nilai maksimum Mahalanobis d-squared	Keterangan
152	37,977	Tidak ada outlier

Perhitungan jarak *mahalanobis* didasarkan pada nilai chi-square dalam tabel distribusi χ^2 pada derajat bebas sebesar jumlah indikator yang digunakan dalam penelitian. Indikator yang digunakan sebanyak 19 indikator pada tingkat $p < 0,001$ yaitu $\chi^2 (19; 0,001) = 43,82$. Data yang memiliki jarak *mahalanobis* lebih besar dari 43,82 dianggap *multivariate outliers*. Pada Tabel 5.13 dapat dilihat bahwa nilai *mahalanobis* maksimal adalah 37,977, sehingga tidak ada hasil di atas nilai *mahalanobis distance*. Artinya tidak ada data yang dianggap sebagai outlier.

3. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas ada apabila terdapat nilai korelasi antar indikator yang nilainya di atas 0,90 (Ghozali, 2011). Pada hasil korelasi antar variabel, terlihat bahwa tidak ada nilai korelasi antar indikator yang nilainya $\geq 0,9$, maka disimpulkan tidak terjadi *multikolineritas* antar variabel dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan nilai *Critical Ratio (C.R)* dan nilai probabilitas. Jika nilai C.R lebih dari 1,96 dan probabilitas kurang dari 0,05, maka pengaruh variabel dapat dikatakan signifikan (Ghozalli, 2011)

Hasil uji hipotesis pengaruh antar variabel dapat disajikan Pada Tabel 2.

Tabel 4.3
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

	Pengaruh	Kesimpulan
H1	Sistem pengendalian <i>intern</i> berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi pegawai	Diterima CR = 3,271 > 1,96 P = 0,001 < 0,05
H2	Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi pegawai	Diterima CR = 2,552 > 1,96 P = 0,011 < 0,05
H3	Sistem	Diterima

	Pengaruh	Kesimpulan
	pengendalian <i>intern</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah	CR = 2,284 > 1,96 P = 0,022 < 0,05
H4	Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah	Diterima CR = 3,690 > 1,96 P = 0,000 < 0,05
H5	Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah	Diterima CR = 3,314 > 1,96 P = 0,000 < 0,05

Pembahasan

Pengaruh sistem pengendalian *intern* terhadap komitmen organisasional

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa sistem pengendalian *intern* berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Artinya, semakin baik sistem pengendalian *intern*, maka komitmen organisasi pegawai cenderung semakin meningkat.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Fatimah, Habbe & Fatah (2019) menunjukkan bahwa pengendalian *internal* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui komitmen

organisasi. Pane & Fatmawati (2017) menunjukkan bahwa komitmen organisasi menjadi salah satu dipengaruhi oleh faktor tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi.

Adanya sistem pengawasan yang baik, maka kepatuhan pegawai akan lebih meningkat. Selanjutnya pegawai akan lebih berkomitmen pada organisasi. Fatimah, Habbe & Fattah menjelaskan (2019) bahwa individu cenderung mematuhi hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma *internal*. Artinya, hukum dianggap sebagai komitmen normatif melalui legitimasi kepatuhan terhadap aturan. Hal ini selaras dengan temuan penelitian ini pada variabel komitmen organisasi, dimana komitmen normatif menjadi indikator tertinggi.

Faktor informasi dan komunikasi menjadi indikator terendah. Temuan ini menunjukkan bahwa masih ada pegawai yang kurang memahami sepenuhnya mengenai tata cara kepegawaian mengenai etika dan perilaku. Hal ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan informasi oleh masing-masing pegawai, sehingga ada pegawai yang tidak melaksanakan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

Pengaruh Pengelolaan keuangan daerah terhadap komitmen organisasional

Hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. Artinya, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat memudahkan pegawai dalam menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku, sehingga komitmen organisasi pegawai cenderung semakin meningkat.

Temuan penelitian ini didukung oleh penjelasan Lestari & Yuniarto (2015) bahwa pemberdayaan pegawai berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Dalam pengelolaan keuangan terdapat proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang semuanya memerlukan pemberdayaan pegawai.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa persepsi pegawai terhadap pengelolaan keuangan daerah terlihat bahwa aspek transparansi menjadi yang paling dominan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Putera, 2016). Adanya transparansi membuat pegawai tidak merasa takut jika terjadi kesalahan, karena semua hasil kerja disampaikan secara transparan. Dengan demikian pegawai akan lebih termotivasi dalam bekerja, sehingga pada akhirnya komitmen organisasi lebih meningkat.

Pengaruh Sistem pengendalian *intern* terhadap Kinerja pemerintah daerah

Sesuai hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa sistem pengendalian *intern* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya, semakin baik sistem pengendalian *intern*, maka kinerja pemerintah daerah cenderung semakin meningkat.

Senada dengan penelitian terdahulu oleh Azlina & Amelia (2014) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *good governance* dan pengendalian *intern* terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Pelalawan. Penelitian Mire (2016) menyimpulkan bahwa lingkungan kontrol, penilaian risiko dan aktivitas pengendalian secara positif mempengaruhi kinerja organisasi. Winangsit (2019) menyebutkan bahwa sistem pengendalian *intern* yang baik penting karena dengan sistem pengendalian *intern*, diharapkan akan memberikan keyakinan bagi pemerintah bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pengawasan *internal* bertujuan agar pelaksanaan kegiatan operasional berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, dengan adanya pengawasan yang melekat maka kegiatan akan lebih terkontrol sehingga penyimpangan dapat diminimalkan, dengan demikian akan dapat meningkatkan kinerja (Anisatul, Saptatintah, & Harimurti, 2017).

Pengaruh Pengelolaan keuangan daerah terhadap Kinerja pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya, apabila pengelolaan keuangan daerah lebih baik, maka kinerja pemerintah daerah cenderung semakin meningkat.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Nasution (2018) menunjukkan adanya pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. Penelitian Ratna & Nasrah (2016) menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian lainnya oleh Anisatul, Saptatintah, & Harimurti (2017) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Annisa (2017) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintah, artinya jika pengelolaan keuangan daerah terlaksana dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menuntut adanya desentralisasi. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada pegawai pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, sehingga memberikan rasa tanggung jawab dan mendorong kreativitas pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Individu yang terlibat dan diberi tanggung jawab dalam penyusunan anggaran akan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan, sehingga kinerja organisasi akan semakin meningkat.

Pengaruh Komitmen organisasional terhadap Kinerja pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya, semakin tinggi komitmen pegawai pada organisasi, maka kinerja pemerintah daerah cenderung semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Pane dan Fatmawati (2019) menemukan bahwa terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Hasil penelitian Pratiwi & Wirakusuma (2017) menunjukkan bahwa komitmen organisasi, penganggaran partisipatif dan kompetensi secara simultan berpengaruh positif signifikan pada kinerja manajerial penyelenggara pemerintahan desa. Temuan penelitian Andrew (2017) mengungkapkan bahwa ada hubungan positif antara ketiga komitmen (komitemn afektif, berkelanjutan, dan normatif) dengan kinerja organisasi.

Individu yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi maka ia akan berusaha berkinerja sebaik mungkin dengan harapan untuk tetap bertahan dalam organisasi tersebut. Berbeda dengan individu yang tidak memiliki komitmen dalam organisasi, mereka cenderung berkinerja sekehendak sendiri tanpa berusaha untuk melakukan yang terbaik (Pratiwi, 2019). Hal ini berarti komitmen yang tinggi dalam diri pegawai mendorong pegawai untuk melaksanakan tugas secara maksimal.

Pengaruh sistem pengendalian *intern* terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasional sebagai variabel *intervening*

Hasil pengujian pengaruh *intervening* dengan uji sobel menunjukkan komitmen organisasi memediasi pengaruh sistem pengendalian *intern* terhadap kinerja pemerintah daerah. Sistem pengendalian *intern* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah melalui komitmen organisasi. Adanya sistem pengendalian *intern* yang baik akan meningkatkan kepatuhan pegawai. Sikap patuh pegawai menunjukkan bahwa pegawai lebih berkomitmen pada organisasi. Selanjutnya hal ini akan mampu memberikan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Temuan penelitian ini mendukung pernyataan Pane & Fatmawati (2017) bahwa komitmen organisasi menjadi salah satu dipengaruhi oleh faktor tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi. Komitmen organisasi juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (Andrew, 2017).

Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasional sebagai variabel *intervening*

Hasil pengujian pengaruh *intervening* uji sobel menunjukkan bahwa komitmen organisasi memediasi pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah melalui komitmen organisasi. Artinya, dalam pengelolaan keuangan daerah, pegawai pengelola keuangan bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran negara. Pegawai akan berkomitmen penuh untuk melaksanakan kewenangan dan menjalankan tugas sesuai aturan. Apabila seluruh pengelola keuangan telah bekerja sesuai peraturan yang berlaku, maka sistem pengelolaan keuangan akan berjalan dengan baik, sehingga kinerja pemerintah daerah akan lebih baik.

E. KESIMPULAN

Sistem pengendalian *intern* dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional. Sistem pengendalian *intern* dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sistem pengendalian *intern* dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah melalui komitmen organisasional sebagai *intervening*.

Saran

- a. Sistem pengendalian *intern* pegawai Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara masih rendah pada indikator informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi perlu dimaksimalkan oleh pegawai untuk mendapatkan keakuratan data dan kecepatan informasi sehingga kinerja menjadi lebih baik.
- b. Pada pengelolaan keuangan daerah aspek *value for money* dirasa masih kurang efektif. Evaluasi perlu dilakukan terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa, serta evaluasi terhadap kesesuaian kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Komitmen organisasi masih rendah pada aspek komitmen kontinyu. Pemberian kompensasi finansial langsung bisa diwujudkan dalam hal pemberian insentif yang layak, sehingga pegawai akan merasa mendapatkan penghargaan dari hasil kerja kerasnya. Hal ini dapat meningkatkan komitmen pegawai pada organisasi.
- d. Kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan melalui keahlian bagian pengelola keuangan, salah satunya melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai sesuai tugas dan fungsinya. Pegawai yang kompeten diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung kinerja pemerintah daerah yang baik, seperti penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, Anthony. 2017. Employees' Commitment and Its Impact on Organizational Performance. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 5(2), p. 1-13.
- Anisatul, Saptantinah & Harimurti. 2017. Pengaruh Pengawasan *Internal*, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Survey pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar). *Jurnal Eksplorasi*, 29 (2), hal. 283-294.
- Azlina, Nur & Ira Amelia. 2014. Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian *Intern* Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12 (2), hal. 32-42.
- Defitri, Siska Yulia. 2018. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), hal.64-75.
- Eristanti, Baiq Dwi Apryana & I Nyoman Nugraha Ardana Putra. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), hal. 91-104.
- Fatimah, S., Abdul Hamid Habbe, Sanusi Fattah. 2019. The Effect of *Internal* Control, Human Resources Competency, and Use of Information Technology on Quality of

- Financial Statement with Organizational Commitment as *Intervening* Variables. **International Journal of Innovative Science and Research Technology**, 4(12). P. 1-10.
- Ghozali, Imam, 2017. *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi program AMOS 24*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lestari, L. & Yuniarto, A. 2017. The Effect Of Empowerment On Employee Performance With Organizational Commitment As Mediating Variable And Organizational Culture As Moderation Variable. *2nd Conference in Business, Accounting, and Management*, 2(1), h. 335-343. Winangsit (2019)
- Mire, Hassan Adam. 2016. Effects Of *Internal* Control System On The Organizational Performance Of Remittance Companies In Modadishu-Somalia. *IJRDO - Journal of Business Management*, 2(9), p. 153-167.
- Moha, F., Lintje Kalangi, Jessy D.L Warongan. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* Dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal EMBA*, 5(2), h. 1359 –1370.
- Nasution, Dito Aditia Darma. 2018. Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), hal. 149-162.
- Pane, Sri Gustina & Fatmawati. 2017. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis (JRMB)*, 2(3), h. 67-79.
- Pangkey, Aldy H. R. Ivonne S. Saerang, & Joy E. Tulung. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal EMBA*, 5(2), h. 2848-2858.
- Praja, Noval Hadi. 2015. Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah, Dan Peran Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. *Jom FEKON*, 2(2), 1-15.
- Pratiwi, Luh Made Intan & Made Gede Wirakusuma. 2019. Pengaruh Komitmen Organisasi, Penganggaran Partisipatif, Dan Kompetensi Pada Kinerja Manajerial Penyelenggara Pemerintahan Desa. *E-Ja: E Jurnal Akuntansi*, 28(3), hal. 1667-1681.
- Putera, Roni Ekha. 2016. Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Di Kabupaten Tanah Datar Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal. *Sosiohumaniora*, 18(3), hal. 261 – 269.
- Ratna, Ikhwan & Hidayati Nasrah. 2016. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian sosial keagamaan*, 19(1), hal. 57-79.
- Rinie, Vincent Mak Pranata, & Rapina. 2019. Pengaruh Pengendalian *Internal* dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Survei pada Perusahaan Tekstil di Kota Bandung dan Sekitarnya). *JAFTA* 1(1), hal. 15-30.
-

Sadat, Anuar. 2019. Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Medan Denai. *Jurnal Taushiah FAI-UISU*, 2(2), h. 14-19.

Wulandari, Dewi Novita & Muhammad Nuryatno. 2018. Pengaruh Pengendalian *Internal*, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, Dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan. *JRAMB*, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, *UMB* Yogyakarta, 4 (2), hal. 117-125.